

**MODEL KADERISASI PARTAI POLITIK MELALUI SAYAP PARTAI
DIBIDANG KEPEMUDAAN
(Studi Perbandingan Sayap Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional
Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera)**

(SKRIPSI)

Oleh:

Ridho Ferdian



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

**MODEL KADERISASI PARTAI POLITIK MELALUI SAYAP PARTAI
DIBIDANG KEPEMUDAAN
(Studi Perbandingan Sayap Partai Gerakan Indonesia Raya,
Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera)**

ABSTRAK

Oleh. Ridho Ferdian

Keberadaan organisasi sayap bagi partai politik adalah suatu hak yang legal berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, keberadaannya bukan sekedar pemenuhan hak undang-undang dan pelengkap struktural semata, melainkan kebutuhan nyata sebagai pendukung peran dan fungsi partai politik terutama dalam hal kaderisasi dan regenerasi partai politik, namun partai politik masih menerapkan rekrutmen instan dengan merekrut kader berdasarkan popularitas dan mapan secara finansial yang akhirnya melahirkan kader yang pragmatis dan menyampingkan proses regenerasi. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui model kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Gerindra, NasDem, PKS melalui sayap partai dalam bidang kepemudaan. Kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan kaderisasi melalui sayap partai politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan prinsip kaderisasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang pertama, terbuka, artinya anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (*training*) dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam proses kaderisasi. Kedua, tertutup/diskriminatif yaitu adanya pemberian akses yang berbeda dalam proses kaderisasi. Ketiga, berjenjang, artinya penjenjangan kaderisasi parpol didasarkan pelapisan yang bertahap. Hasil dari penelitian ini adalah Partai Gerindra dan NasDem telah melakukan pola kaderisasi terbuka, tidak tertutup/diskriminatif serta berjenjang, kedua partai tersebut dalam merekrut kader tidak ada batasan tertentu semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat pelatihan menjadi kader yang mumpuni. PKS menganut sistem tertutup dan menggunakan prinsip berjenjang, partai ini merekrut calon-calon anggota yang memiliki nilai religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islami. Kelebihan pada model kaderisasi sayap partai adalah dari segi sumber daya manusia dan kultur partai politik. Pemberdayaan organisasi sayap partai politik dibutuhkan karena dari situlah seorang kader dilatih bagaimana membangun sistem politik yang baik. Dari segi kultur partai politik, ketiga partai tersebut memiliki kultur yang dinamis dan memiliki citra yang baik di mata masyarakat. Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah, dari segi keuangan partai, partai hanya bergantung pada dana kas anggota dan bantuan pemerintah, sehingga terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.

Kata Kunci : Model, Kaderisasi, Partai Politik, Sayap Partai

**MODEL OF CADERIZATION THROUGH THE WINGS OF THE PARTIES
IN THE FIELD OF YOUTH**

(Comparative Study of the Wings of Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional Demokrat, and Partai Keadilan Sejahtera)

ABSTRACT

Written By Ridho Ferdian

The existence of a wing organization for political parties is a legal right based on Law No. 2 of 2011 concerning political parties, its existence is not merely the fulfillment of legal rights and structural additions, but rather real needs as supporting political parties' roles and functions, especially in regeneration and regeneration political parties, but political parties still apply instant recruitment by recruiting cadres based on popularity and financially established which eventually gives birth to pragmatic cadres and overrides the regeneration process. The purpose of this research is to find out the regeneration model carried out by the Gerindra Party, NasDem, PKS through the party wing in the field of youth. Second, to find out the strengths and weaknesses of regeneration through the wings of political parties. This study uses qualitative research methods with the principle of regeneration issued by the Corruption Eradication Commission (KPK), the first, open, meaning that political party members have the same opportunity to get training (training) and other activities in the regeneration process. Second, closed / discriminatory, namely the provision of different accesses in the regeneration process. Third, tiered, meaning that the cadre formation of political parties is based on gradual coatings. The results of this study are that Gerindra and NasDem parties have carried out an open, non-closed / discriminatory and tiered pattern of regeneration, both parties in recruiting cadres have no certain limits, all have equal opportunities to be trained as qualified cadres. PKS adheres to a closed system and uses tiered principles, this party recruits prospective members who have religious values and uphold Islamic values. Strengths in the cadre regeneration model of the party are in terms of human resources and the culture of political parties. Empowerment of political party wing organizations is needed because that's where a cadre is trained how to build a good political system. In terms of the culture of political parties, the three parties have a dynamic culture and have a good image in the eyes of the public. Whereas the weakness is, in terms of party finance, the party only relies on member cash funds and government assistance, so that it is limited to carrying out certain activities.

Keywords: Model, Caderization, Political Parties, Wings of the Party

**MODEL KADERISASI PARTAI POLITIK MELALUI SAYAP PARTAI
DIBIDANG KEPEMUDAAN
(Studi Perbandingan Sayap Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional
Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera)**

Oleh:

RIDHO FERDIAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu syarat mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

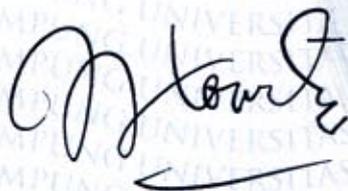
Judul Skripsi : **MODEL KADERISASI PARTAI POLITIK
MELALUI SAYAP PARTAI DIBIDANG
KEPEMUDAAN
(Studi Perbandingan Sayap Partai Gerakan Indonesia
Raya, Partai Nasional Demokrat dan Partai Keadilan
Sejahtera)**

Nama Mahasiswa : **Ridho Ferdian**

No. Pokok Mahasiswa : **1416021094**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

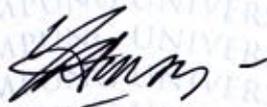


Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006



Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

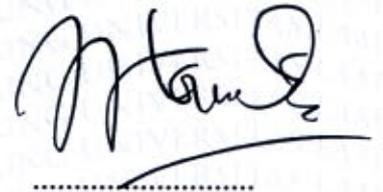


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

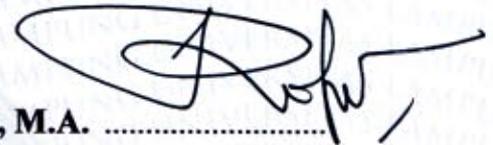
Ketua : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



Sekretaris : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



Penguji : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **27 Juni 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2019

Yang Membuat Pernyataan



Ridho Ferdian
Ridho Ferdian
NPM. 1416021094

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Ridho ferdian, lahir di Bandar Jaya pada tanggal 8 Mei 1996. Peneliti merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, putra pasangan Bapak Lisa harisni, SH dan Ibu Herlina,S.st. Jenjang pendidikan Peneliti dimulai dari

SD Negeri 1 Onoharjo Lampung Tengah yang diselesaikan tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 6 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya, Peneliti mengenyam pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA AL-Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2014. Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur tes bersama (SBMPTN) pada tahun 2014, dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Pada tahun 2017 di bulan Juli, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumur Kumbang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 hari.

Motto

Sedikit dan cukup lebih baik dari pada yang banyak dan melalaikan.

(HR. Abu Nu'aim)

Jangan melihat keluar lihatlah ke dalam diri sendiri dan carilah itu.

(Jalaluddin Rumi)

*Saya percaya bahwa sebuah tujuan pasti akan tercapai
jika sulit untuk dicapai jangan ubah tujuannya akan
tetapi ubahlah langkah-langkahnya.*

(Ridho Ferdian)

Persembahan

Ku Persembahkan Karya ini
Kepada

Kedua orang tuaku tercinta atas segala pengorbanannya disertai do'a yang tulus dan tiada henti untuk segala urusanku dan keberhasilanku.. Terimakasih yangtak terhingga untuk segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepadaku.

Mamasku yang selalu memberikan doa, semangat serta dukungannya yang tiada henti selama ini.

Seluruh keluarga besarku, sahabat dan teman-teman yang selalu mendukungku.

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Billahirrahmanirrahim

Puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul “Kaderisasi Partai Politik Melalui Sayap Partai (Studi Perbandingan Partai Politik Gerindra, NasDem dan PKS)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Lisa Harisni, SH dan Herlina, S.st atas segala doa, cinta dan kasih sayang, dukungan dan semangat serta perhatian yang terus mengalir dan tak mampu penulis balas segala jasa dan kebaikannya. Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kasih sayangnya serta balasan atas segala jasa dan kebaikan Ayahanda dan Ibunda.

2. Kakak dan adik kandung penulis, Virsanima Fernando dan Cania Shabilla Putri Terima kasih atas segala doa dan semangat serta cinta dan kasih sayang yang diberikan, semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan, kekuatan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kita mampu menjadi anak yang membanggakan orang tua kita.
3. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan Jajaran serta Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu FISIP Universitas Lampung, dan serta selaku pembimbing kedua, terima kasih telah memberikan saran serta memotivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Hertanto, M.si., Ph.D. selaku pembimbing utama skripsi, terima kasih telah banyak memberikan masukan dan memotivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, MA. selaku penguji, terima kasih telah banyak memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti.
7. Seluruh informan, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan informasi terkait masalah yang penulis angkat.
8. Debby yang selalu mengiringi dengan suport sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terus semangat dalam mengejar cita cita agar kelak dapat membahagiakan orang tua. Semoga Allah SWT selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam segala urusan.

9. Sahabatku, sodaraku Indra Amoza Perdana, SH terima kasih atas segala waktu, Terima kasih sudah setia menjadi sahabat penulis hingga saat ini. Semoga perjalanan hijrahmu menjadi amalan mu, semoga penulis juga bisa memperbaiki diri dan mendapatkan hidayah untuk hijrah. Tetap terus semangat untuk melanjutkan skripsinya jangan pantang menyerah.
10. Sahabatku, saudaraku, Haifa Puti Arlin, S.Pd orang yang selalu tidak mau ribet tapi baik kepada penulis. Terima kasih untuk, selalu mendengarkan dan memberikan motivasi kepada penulis dalam segala keadaan, telah sabar menghadapi penulis yang ngeyel ini. Semoga Allah SWT selalu melindungimu dimanapun kau berada, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dan dapat mencapai kesuksesan.
11. Sahabatku, saudaraku, Aldi Dirga Mirza orang yang selalu ngenakin ngobrol yang gak bisa diem dan yang selalu ada untuk penulis dikala siang malam disaat sedih senang. Terima kasih untuk, selalu mendengarkan dan memberikan motivasi kepada penulis dalam segala keadaan, telah sabar menghadapi penulis yang egois ini. Semoga Allah SWT selalu melindungimu dimanapun kau berada, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dan dapat mencapai kesuksesan.
12. Teman seperjuangan ilmu pemerintahan Fira, Tika, Mike, Dian, Ulfa, Iranda, Kartika tetap terus semangat di semua kesuksesan pasti ada prosesnya dan semua masalah pasti ada jalannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan kesuksesan dalam segala urusan.

13. Sekelompok group Arisan Nunggak terima kasih orang yang selalu ada untuk penulis baik pagi siang malam, M.Wiryawan, Risty Nadya sabrina, Nadya Octa, Indra Amoza, Samid orang-orang penting yang memacu untuk menjadi lebih baik dan memiliki mimpi menjadi orang yang dapat mempengaruhi banyak orang baik dalam negeri maupun luar negeri karna kita muda punya penuh ide kreatif.
14. Teman hidup penulis selama 40 hari KKN, Redhi, Yola, Niza, Salim, Ucok, Anin, Leila, Mara, Otin, Andri, Ardiansyah, Grace, Naufal, Ganjar,. Terima kasih sudah menjadi keluarga. Semoga silaturahmi selalu terjalin.
15. Sekelompok group YFH Dimas, Niko, Yanto, Iwan, Peppy, Aryan, Agus terima kasih untuk semua dukugan kalian yang memotivasi bergeraknya skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kesuksesan dalam segala urusan kalian semua.
16. Sekelompok pelajar dan mahasiswa Lampung Tengah eki, toto, abid, aji, wimba, eby. Terima kasih kalian semua sudah mendukung penulis untuk menjadi lebih baik dan memberi waktu kalian untuk menghibur penulis semoga penulis bisa membalas kebaikan kalian dan Allah SWT akan selalu menjaga dan memberikan amal yang selayak Nya kalian dapatkan.
17. Teman-teman perkumpulan kosan Kiyai billy, Aldin, Bayu, Abu bewok, Kiyay Iqbal, Jo Ndo, Yoga, Brili, Sandi. Terima kasih untuk kalian semua telah menghibur penulis selama perkuliahan tetap terus bergerak untuk meraih cita-cita yang diinginkan.

18. Teman-teman hura hura Ari, Aldi, billy,bagus, Safta, Takwa, Fadil, Nyunyun, Deka, Bebe,depoy. Terimakasih untuk kalian semua telah menghibur penulis dari kejenuhan di rumah tetap terus semangat mencari jati diri dan raih cita-cita yang kalian inginkan. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dan dapat mencapai kesuksesan.
19. Teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 terima kasih untuk semuanya mohon maaf penulis tidak bisa menulis satu persatu nama kalian semua karna penulis butuh waktu lama melakukan itu.
20. Untuk Teman-temanku yang selalu ada dibelakang layar terima kasih untuk dukungannya, kalian berarti untuk penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Bandar Lampung, 24 Juni 2019

Ridho Ferdian

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Partai Politik.....	14
1. Pengertian Partai Politik.....	14
2. Fungsi Partai Politik.....	15
3. Klasifikasi Partai Politik	18
B. Kaderisasi Partai Politik.....	20
1. Prinsip Kaderisasi.....	22
2. Model Kaderisasi.....	25
C. Sayap Partai Politik.....	27
1. Pengertian Organisasi Sayap.....	27
2. Fungsi Organisasi Sayap.....	27
D. Kerangka Pikir.....	31

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Penentuan Informan.....	35
E. Jenis Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Pengolaan Data	39
H. Teknik Analisis Data	40
I. Teknik Validasi/Keabsahan Data.....	41

IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Partai Gerindra.....	44
B. Partai Nasional Demokrat.....	53
C. Partai Keadilan Sejahtera.....	64

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	68
1. Model kaderisasi Partai Politik Melalui Sayap Partai	68
a. Gerindra Masa Depan (Partai Gerindra).....	68
1. Model Kaderisasi Terbuka.....	69
2. Model Kaderisasi Tertutup/Diskriminatif.....	72
3. Model Kaderisasi Berjenjang.....	74
b. Garda Pemuda NasDem.....	76
1. Model Kaderisasi Terbuka.....	76
2. Model Kaderisasi Tertutup/Diskriminatif.....	78
3. Model Kaderisasi Berjenjang.....	81
c. Garuda Keadilan.....	83
1. Model Kaderisasi Terbuka.....	84
2. Model Kaderisasi Tertutup/Diskriminatif.....	86
3. Model Kaderisasi berjenjang.....	88
2. Kelebihan dan Kelemahan Kaderisasi Melalui Sayap Partai.....	89
a. Sumber Daya Manusia.....	90
b. Kondisi Keuangan Partai.....	92
c. Kultur Partai Politik.....	93
B. Pembahasan.....	97
1. Gerindra Masa Depan	99
2. GP NasDem.....	100
3. Garuda Keadilan.....	101

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi, karena dengan demokrasi kekuasaan berada di tangan rakyat, dan rakyatlah yang memegang kekuasaan tidak mungkin menjalankan kekuasaan tersebut secara langsung, melainkan melalui lembaga perwakilan yang dibentuk dengan pemilihan umum. Di negara yang menganut demokrasi terutama di Indonesia menuntut sistem perwakilan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat terwakili melihat masyarakat Indonesia yang sangat pluralitas dengan berbagai ragam suku, kebudayaan, adat istiadat, serta kepercayaan.

Tujuannya agar wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan mencerminkan ragam dukungan yang ada di masyarakat sehingga dalam pengambilan keputusan tidak ada kelompok yang ditinggalkan. Keberadaan demokrasi tanpa adanya partai politik adalah sebuah situasi kekuasaan tanpa legitimasi. Dengan demikian, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai serta cita-cita yang sama, tujuan dari kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik, merebut kekuasaan,serta mempertahankan kedudukan politik dengan

cara konstusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008:404). Partai politik merupakan penghubung yang sangat strategis antara pemerintah dengan yang diperintah. Partai politik dibentuk sebenarnya untuk melaksanakan demokrasi di suatu negara karena partai politik sebagai sarana warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memperjuangkan kepentingannya untuk kelompoknya.

Dengan semakin tingginya peran dan fungsi suatu partai politik, akan semakin berkualitaslah demokrasi. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif. Partai politik harus mengamalkan demokrasi dengan memberi stimuli para kadernya agar memberikan yang terbaik pada Negara dan bangsa yang pada hakekatnya membangun mentalitas juara untuk memenangkan setiap kompetisi dengan melakukan yang terbaik yang bisa dilakukannya (Subiyanto, 2014:85).

Demi terwujudnya suatu demokrasi yang baik partai politik harus mempunyai kader-kader partai yang berkualitas, unggul, kuat serta solid melalui proses rekrutmen dan kaderisasi politik, karena melalui kader partai yang akan maju dalam proses pemilu sebagai wakil rakyat.

Partai politik haruslah berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, dengan mendudukan kader-kadernya menjadi pejabat pemerintah sbagai wakil rakyat, sehingga dapat turut serta dalam mengambil dan menentukan keputusan politik berupa kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan proses rekrutmen yang berarti proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga politik, termasuk jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik.

Rekrutmen politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik ditentukan. Partai politik menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi politik, pada fungsi ini seseorang mengalami proses politik yaitu menyeleksi, menjaring dan melatih calon-calon pemimpin yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang dapat menyalurkan aspirasi dan mengemban amanat dari masyarakat. Dan menjadi pemimpin yang tidak hanya untuk kepentingan partainya tapi juga untuk kepentingan rakyat.

Masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepemimpinan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri (Budiardjo, 2008:408).

Menurut Firmanzah partai politik harus melaksanakan fungsi rekrutmen politik, rekrutmen politik merupakan cara melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan menjadi pengurus partai politik harus diubah dan lebih berorientasi pada masalah bangsa dan negara. Selain itu, proses pengkaderan dan muatan-muatan politis yang diberikan kepada mereka harus diubah. Perlu ditanamkan kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari bangsa dan negara, dan bahwa dipundak mereka terdapat segudang permasalahan bangsa

dan negara yang harus diselesaikan. Selain melakukan rekrutmen partai politik perlu melakukan pendidikan politik kepada kader-kader politiknya. Sistem kaderisasi ini sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan politik, tidak hanya yang terkait dengan visi, misi, dan strategi partai politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara (Firmanzah, 2008:71)

Dengan mempunyai kader-kader politik yang berkualitas, partai politik tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan kader yang berkompentensi sebagai calon pemimpin politik di pemerintahan serta diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintah sebagai pemimpin yang baik dan amanah yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Maka dari itu setiap partai politik pasti mempunyai pola atau sistem rekrutmen dan kaderisasi yang berbeda-beda sesuai dengan sistem pemikiran dan ideologi politik yang dianut masing-masing partai politik.

Pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktifitas partai politik dimulai dari penerimaan anggota, penyeleksian kader, pembinaan kualitas kader sampai dengan penempatan/penugasan kader-kader partai dalam jabatan-jabatan strategis. Kaderisasi belum menjadi prioritas bagi partai politik di Indonesia. Selama masa orde baru hingga era reformasi, mayoritas partai politik masih mengandalkan figur, ketenaran bahkan dinasti, untuk meraih dukungan dalam pemilihan umum.

Banyak partai politik di Indonesia saat ini yang menerapkan kaderisasi instan dengan merekrut tokoh-tokoh yang dianggap populer atau mapan secara finansial untuk memperoleh suara terbanyak dalam suatu pemilihan umum misalnya partai politik merekrut selebritis untuk diajukan dalam pemilihan umum, tentu hal itu dapat merusak proses regenerasi didalam partai politik.

Kebijakan kaderisasi instan lebih banyak menghasilkan kader yang pragmatis. Rendahnya kesadaran akan kualifikasi inilah yang akan menimbulkan partai untuk memaksakan diri dalam mengajukan figur yang tidak berkualitas dalam pemilihan umum baik ditingkat daerah maupun nasional. Hal tersebut sangatlah merugikan partai dan masyarakat dalam jangka panjang namun tidak semua partai politik mempunyai sistem kaderisasi yang jelas. Tingkat pengetahuan dan pemahaman kader dari partai politik tentang visi, misi, dan ideologi partai politik masih dirasa sangat kurang.

Dalam paham demokrasi, sistem politik, dan tata kelola penyelenggaraan negara terasa timpang antara kader partai besar dan partai kecil, maka dapat dikatakan bahwa partai politik belum bisa melaksanakan fungsinya dengan baik untuk memberikan pendidikan politik terhadap generasi selanjutnya. Banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin diwujudkan sehingga perlu adanya upaya untuk memperkuat kondisi internal maupun eksternal partai.

Penguatan secara internal dapat dilakukan melalui konsolidasi internal partai, penguatan proses pengkaderan dan penguatan struktur partai. pada eksternal partai dapat dilakukan dengan melakukan ekspansi terhadap penguatan mesin politik partai seperti organisasi sayap atau juga sering disebut dengan *underbow* partai politik, organisasi sayap ini yang nantinya dapat dijadikan jembatan suatu partai politik untuk menjangkau seluruh golongan masyarakat baik itu pemuda, buruh, perempuan maupun petani yang *notabene* merupakan sumber massa.

Keberadaan organisasi sayap partai politik di Indonesia secara legal baru dan dijamin negara dengan UU Partai Politik yaitu UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 12 ayat (10) yang menyatakan bahwa salah satu hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik Pengakuan dan jaminan yuridis ini merupakan dasar sekaligus peluang bagi pengembangan struktur partai untuk menjangkau seluruh segmen masyarakat.

Pengakuan dan jaminan ini merupakan wujud pentingnya keberadaan organisasi sayap bagi setiap partai politik yang bukan sekedar pelengkap struktural semata, melainkan kebutuhan nyata yang harus dipenuhi. Keberadaan organisasi sayap diharapkan dapat berperan aktif dalam membina, mengembangkan dan memberdayakan komunitas masing-masing masyarakat sesuai dengan ranah, kebutuhan dan masalah yang dihadapinya. Seperti halnya pengkaderan yang merupakan salah satu instrument bagi Partai Politik, kehadiran kader bisa untuk mendongkrak, maupun sekedar mempertahankan elektabilitasnya.

Pemberdayaan organisasi sayap partai politik, seharusnya menjadi keharusan karena dari situlah seorang kader dilatih bagaimana membangun sistem politik yang baik. Penguatan kader yang militan, mampu bersaing secara kapasitas intelektual dan memiliki visi yang jelas sesuai dengan *platform* partai politik.

Organisasi sayap partai politik sangat berperan penting sebagai pintu utama masuk dan menjadikan pilar utama kaderisasi, dan penguatan kader, maka secara otomatis proses seleksi kader untuk duduk sebagai legislatif maupun eksekutif akan lebih mengedepankan kualitas intelektual, serta basis massa pendukung. Kaderisasi partai politik melalui sayap partai merupakan proses dimana setiap kader yang akan menjadi anggota partai politik diwajibkan memahami tentang visi-misi partai, *platform* partai, tujuan dari partai politik.

Partai politik memiliki sayap partai yang berbeda beda misalnya partai nasionalis lebih mengedepankan sayap partai yang mampu menjaring para petani, buruh sedangkan partai agama akan mengedepankan sayap partai bergerak dalam berdakwah, sesuai dengan hak partai politik mendirikan sayap partai yang mampu menyentuh seluruh elemen masyarakat, hal ini tentu mempengaruhi model kaderisasi dari setiap partai politik.

Hubungan antara partai politik dan sayap partai sebagai alat kaderisasi partai politik yang dapat menghasilkan kader yang berkualitas dan tidak menyampingkan proses regenerasi partai politik sangat menarik diteliti, maka penelitian akan mengkaji tentang “Model Kaderisasi Partai Politik Gerindra, NasDem dan PKS Melalui Sayap Partai khususnya dibidang kepemudaan antara

lain Gerindra Masa Depan (GMD) sebagai sayap dari partai Gerindra, GP NasDem sebagai sayap dari partai NasDem dan Garuda Keadilan sebagai sayap dari partai PKS.

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, maka penulis mencantumkan lima penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kaderisasi dan sayap partai politik. Tentu ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, Sebagai berikut :

1. Penelitian Pertama Amaliya Hidayatul Fajrina (2017) tentang kaderisasi partai politik yang berjudul Strategi Rekrutmen Partai Gerindra Dalam Kaderisasi Pemuda di Kota Surabaya. Penelitian ini membahas tentang strategi rekrutmen oleh Partai Gerindra dalam melakukan kaderisasi pemuda di kota Surabaya. Studi ini menggunakan Teori Rekrutmen Politik Michael Rush dan Philip Althoff. Data diperoleh melalui indepth interview dengan beberapa narasumber yaitu pengurus aktif DPC Partai Gerindra Surabaya, serta para kader muda Partai Gerindra Surabaya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Partai Gerindra di kota Surabaya memiliki beberapa strategi dalam melakukan rekrutmen kader muda, diantaranya adalah sistem terbuka, namun terkadang juga ditemukan sistem patronase didalamnya. Hasil penelitian juga menunjukkan model strategi rekrutmen sistem figur masih menjadi strategi yang populer. Diketahui bahwa semua strategi tersebut memberi kesempatan secara luas dan terbuka kepada seluruh muda-mudi Indonesia yang merasa memiliki minat dan kemampuan untuk bergabung bersama dalam Partai Gerindra di kota Surabaya.

2. Penelitian kedua dilakukan Deby Triasa (2012) Sistem Kaderisasi Partai Golkar Era Reformasi (Studi Kasus DPD Golkar Jawa Tengah) alasan yang melatarbelakangi penulis dalam karya ilmiah ini adalah bahwa Partai Golkar telah melahirkan kader-kader baru yang notabene berasal dari golongan pengusaha maupun profesi lainnya dan dipercaya menjadi pemimpin partai maupun menempati posisi-posisi strategis di organisasi, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintahan di era reformasi ini. Perubahan ini menciptakan paradigma baru Partai Golkar dimana Partai Golkar telah ikut mereformasi internal partai sejalan dengan bergulirnya reformasi untuk merubah citra partai di masa orde baru, yaitu sebagai partai pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola rekrutmen politik yang dijalankan oleh Partai Golkar dalam merekrut calon anggota Partai Golkar, mengetahui kaderisasi politik yang dilaksanakan oleh Partai Golkar untuk melahirkan kader-kader partai sesuai dengan paradigma baru Partai Golkar, dan mengetahui pelembagaan politik Partai Golkar dalam rangka memperkokoh internal maupun eksternal partai. menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen politik Partai Golkar di era reformasi bersifat terbuka dan tidak menyiapkan tim seleksi dalam rekrutmen calon anggota partai. Kaderisasi politik Partai Golkar sudah bagus, tetapi masih ada kendala masalah keuangan dan intruktur materi.

Pelembagaan politik Partai Golkar belum sempurna karena masih adanya ketergantungan partai terhadap pihak-pihak yang berasal dari non partai, khususnya masalah dana.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Aditya Surya dan Agus Satmoko (2015) yang berjudul Pola Kaderisasi Kepemimpinan Partai Politik (Studi Pada DPC PDI-P Kabupaten Nganjuk) penelitian ini mengkaji pola kaderisasi kepemimpinan khususnya pada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki secara cermat sistem kaderisasi kepemimpinan, cara kerja dan pelaksanaan kaderisasi kepemimpinan di DPC PDI Perjuangan Kab. Nganjuk. Serta faktor pendukung dan penghambat pola kaderisasi kepemimpinan partai politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kaderisasi kepemimpinan partai politik terdiri dari proses rekrutmen, seleksi kader, dan pendidikan kader di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk di atur dalam anggaran rumah tangga partai ketetapan kongres III PDI Perjuangan No.09/TAP/KONGRES III/PDI-P/2010 BAB I mengungkap penetapan calon anggota dan anggota yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat. Adapun faktor pendukung adalah kekompakan dan pemahaman yang sama terhadap ideologi Pancasila, sedangkan faktor penghambat adalah sebagian anggota yang tidak memahami ideologi Pancasila sebagai tugas partai.

4. Penelitian kedua dilakukan oleh M. Djadijono (2008) meneliti tentang organisasi sayap partai dengan judul Formulasi Hubungan Parpol Dengan Organisasi Sayap Partai latar belakang dari penelitian ini adalah meskipun keberadaan organisasi sayap partai sudah ditegaskan dalam UU No. 2 tahun 2008 tata aturan hubungan dengan parpol belum jelas dirinci dalam UU maupun AD dan ART parpol. Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa hubungan parpol dengan sayap partai harus bersifat menguntungkan, selain itu setiap kegiatan yang dilakukan oleh sayap partai harus sepenuhnya didukung oleh parpol induknya. Maka dari itu organisasi sayap partai perlu melaksanakan fungsi-fungsi dengan baik.

5. Penelitian ketiga dilakukan oleh Bayu Mitra Adhytama Kusuma dan Theresia Octastefani (2017) tentang sayap partai dengan judul Negoisasi Dakwah Dan Politik Praktis (Membaca Orientasi Organisasi Sayap Keagamaan Islam Pada Partai Nasionalis) dilatar belakangi dengan agama Islam yang sering digunakan sebagai basis ideologi dan perjuangan di era demokrasi, umat Islam saat ini memiliki berbagai saluran politik melalui partai politik Islam.

Tetapi setiap partai memiliki kepentingan yang berbeda meskipun sama-sama menggambarkan dirinya sebagai partai dakwah atau rumah politik Muslim Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa organisasi sayap keagamaan Islam oleh partai politik nasionalis lebih pada politik dakwah daripada dakwah. Sehingga dalam negosiasi antara dakwah dan politik praktis, aspek politik lebih diuntungkan daripada aspek dakwah.

Adapun perbedaan kelima penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada tujuan penelitian dari kelima penelitian sebelumnya tidak ada yang meneliti tentang bagaimana model kaderisasi partai politik melalui sayap partai, melihat situasi pada saat ini banyak partai politik yang memilih kader secara instan inilah yang akan menimbulkan partai untuk memaksakan diri dalam mengajukan figur yang tidak berkualitas dalam pemilihan umum baik ditingkat daerah maupun nasional. Peneliti tertarik mengambil penelitian kaderisasi melalui sayap partai terutama sayap partai sebagai sarana rekrutmen dan kaderisasi partai politik tentu kadernya lebih memahami tentang visi, misi, dan ideologi partai politik itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah

- a. Bagaimana model kaderisasi Partai Gerindra, NasDem, PKS melalui sayap partai khususnya dibidang kepemudaan sehingga menghasilkan kader yang berkualitas terhadap partainya?
- b. Apa kelebihan dan kelemahan kaderisasi melalui sayap partai politik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab dari rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui

- a. Bagaimana model kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Gerindra, NasDem, PKS melalui sayap partai dibidang kepemudaan sehingga menghasilkan kader yang berkualitas?
- b. Apa kelebihan dan kelemahan kaderisasi melalui sayap partai politik.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai bahan informasi ilmiah untuk para peneliti lain yang ingin mengetahui model kaderisasi partai politik melalui sayap partai.
 - b. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.
 - c. Menjelaskan fenomena sosial politik yang ada.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai bahan untuk membantu para pelaku politik, dan sumbangan pemikiran dalam memperkuat demokratisasi di berbagai daerah.
 - b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian ditempat lain

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu sarana yang menghubungkan antara pemerintah dengan rakyat. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu, melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiardjo, 2008:404).

Dalam bukunya *Ekonomik Et Societie* Marx Weber memberikan defenisi tentang partai politik, menurutnya partai politik adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut (Firmanzah, 2008:66).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas mengenai partai politik, partai politik mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah negara terutama di negara dengan menerapkan sistem demokrasi. Secara sederhana partai politik merupakan *representation of ideas* yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokrasi. Partai politik sebagai suatu organisasi yang

berorientasi pada *representation of ideas* secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat atau tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimasi.

2. Fungsi Partai Politik

Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat di bedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi, di sini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik (Firmanzah, 2008:67).

Fungsi, hak, dan kewajiban sebuah partai politik telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Berikut merupakan fungsi partai politik menurut UU No.2 Tahun 2011 Pasal 12:

- a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar
- b) Menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.

- d) Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- e) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Budiardjo dalam menyelenggarakan demokrasi partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut :

- a) Sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik mempunyai fungsi salah satunya sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara pemerintah dengan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada masyarakat dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan rakyat. Menurut Sigmund Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.

- b) Sebagai sarana sosialisasi politik.

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Proses sosialisasi politik berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Proses ini dapat diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan

informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat.

c) Sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

d) Sebagai sarana pengatur konflik

Potensi konflik akan selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen dengan berbagai macam suku bangsa, sosial-ekonomi, maupun agama. Peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. (Budiardjo, 2008:405)

3. Klasifikasi Partai Politik

Suatu negara dengan sistem demokrasi tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan partai politik sebagai pilar demokrasi. Partai politik sebagai atribut suatu negara dan mempunyai fungsi yang erat kaitannya dengan jalannya pemerintahan. Partai politik merupakan infrastruktur politik yang ada di masyarakat, partai politik merupakan organisasi non pemerintahan yang mempunyai tujuan tertentu dan berusaha untuk mencapai tujuan dengan cara menduduki suatu pemerintahan melalui pemilihan umum.

Klasifikasi partai dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, secara umum dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai massa dan partai kader. Menurut Haryanto, partai politik dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara

umum dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai massa dan partai kader.

Menurut Haryanto, partai politik dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibagi mejadi dua kategori, yaitu (Adrianus, 2005:567) :

- a) Partai massa, dengan ciri utamanya adalah jumlah anggota atau pendukung yang banyak. Meskipun demikian, partai jenis ini memiliki program walaupun program tersebut agak kabur dan terlampau umum. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai tersebut mempunyai keinginan

untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Selanjutnya, jika kepentingan kelompok tersebut tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan partai sendiri.

- b) Partai kader, kebalikan dari partai massa, partai kader mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah, partai kader lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi. doktrin dan ideologi partai harus tetap terjaga kemurniannya. Bagi anggota yang menyeleweng, akan dipecat keanggotaannya

Partai politik pada umumnya dapat diklasifikasikan menurut tiga kriteria (Kantaprawira, 2002:67).

- a) Berdasarkan komposisi dan keanggotaannya secara umum partai politik dibagi dalam dua jenis, yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, sedangkan partai kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya.
- b) Berdasarkan sifat dan orientasinya klasifikasi ini membagi partai menjadi dua jenis, yaitu pertama, partai perlindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Kedua, partai ideologi atau partai azas biasanya mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat.

c) Berdasarkan sistem kepartaian. Secara konvensional, dikenal tiga sistem klasifikasi sistem kepartaian. Pertama, sistem satu partai (*one party system*). Dalam suatu negara hanya ada satu partai, atau dalam suatu negara sebenarnya terdapat partai-partai lain, namun karena terlalu kecilnya partai-partai tersebut, hanya satu partai yang dominan dalam politiknya. Kedua, sistem dwi partai, yaitu dalam suatu negara terdapat dua partai. Dalam sistem ini biasanya partai yang menang dalam pemilihan umum menduduki posisi pemerintahan (berkuasa).

Sebaliknya partai yang kalah menjadi oposisi setia (*loyal opposition*) terhadap kebijakan partai yang berkuasa. Ketiga sistem banyak partai (*multy party system*). Dimaksudkan bahwa di suatu Negara terdapat banyak partai, tidak terpengaruh berapa jumlah partai dan partai mana yang berkuasa.

B. Kaderisasi Partai Politik

Kaderisasi lebih bersifat sebagai proses *intervensi* dari partai politik untuk meningkatkan kapasitas individual para anggotanya agar mampu menjalankan sebagai fungsi partai. Selain itu, secara eksternal, kaderisasi juga berartipenting bagi tanggung jawab partai dalam melakukan pendidikan politik kepada publik. Kaderisasi sekaligus juga berguna untuk memastikan bahwa orang-orang yang terseleksi dalam proses rekrutmen adalah orang yang kompeten atau memiliki layolitas terhadap partai. Karakteristik kaderisasi yang ingin dihasilkan ini akan juga ditentukan oleh kecenderungan tipe dari partai yang bersangkutan.

Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah partai politik, karena ini merupakan inti dari kelanjutan perjuangan partai ke depan dan juga inti dari keberadaan partai politik. Tanpa kaderisasi kepemimpinan, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah partai politik dapat bergerak dan melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi kepemimpinan adalah sebuah syarat mutlak dalam membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan.

Kaderisasi sangat penting mengingat perlu ada transfer pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam suatu kajian tertentu. Fungsi kaderisasi dalam partai politik adalah mempersiapkan calon-calon untuk siap menerima mengelola partainya ke depan. Kaderisasi juga merupakan proses untuk melatih dan mempersiapkan anggota partai dengan berbagai keterampilan, disiplin ilmu dan pengalaman untuk mencapai tujuan partai.

Syamsudin dkk dalam panduan rekrutmen dan kaderisasi partai politik Partai politik mengatakan, harus menciptakan pola pembinaan kader yang terprogram, terukur, sistematis, dan komprehensif serta berlaku di semua lini kader dan wilayah kader yang mencakup:

- a) Adanya tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk sistem pengkaderan, baik pengkaderan umum dan pengkaderan khusus;
- b) Adanya model rekrutmen yang terbuka dan demokratis;
- c) Terdapatnya sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan;

- d) Membentuk jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader demi meningkatkan kualitas kader agar lahir kader-kader yang loyal dan berdedikasi tinggi;
- e) Perlu dilakukan *affirmative action* dalam merekrut dan melakukan pola pembinaan perempuan kader partai guna mencapai meningkatkan jumlah perempuan dalam partai politik, parlemen, maupun jabatan-jabatan publik. Selain itu kaderisasi pada kelompok perempuan juga berarti meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perempuan terkait dengan peran yang dimainkan dalam partapo politik, parlemen dan jabatan publik lainnya; dan
- f) Model pembinaan perempuan kader partai, baik dari segi strategi pembinaan, materi pembinaan maupun metode pembinaan hendaknya dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan

1. Prinsip Kaderisasi

Kaderisasi partai politik dapat dilakukan dengan baik hanya jika dalam proses tersebut berlaku prinsip-prinsip sebagai berikut:

Terbuka. Prinsip terbuka ini mengandung arti bahwa proses kaderisasi harus dapat diikuti oleh semua anggota partai politik, artinya anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (*training*) dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam proses kaderisasi. Kaderisasi perlu disertai jaminan bahwa semua kader yang telah menjadi anggota partai politik maupun anggota sayap partai yang memiliki potensi dan/ atau dengan penilaian lain yang telah ditentukan oleh partai politik yang sifatnya demokratis dapat mengikuti seluruh jenjang kegiatan kaderisasi. Dalam kaitan

ini, perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Kader harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan. Dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi kepemimpinan akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.

Tertutup/Diskriminatif. Pemberian akses yang berbeda dalam proses kaderisasi juga sekaligus berarti bahwa mekanisme kaderisasi juga membuka ruang yang sama untuk seluruh anggota untuk mengikuti atau mendapatkan promosi dan karier politik melalui proses kaderisasi tanpa membedakan warna kulit, golongan, agama, gender, serta suku. Prinsip non-diskriminatif dalam kaderisasi sekaligus dapat mengurangi oligarkhi parpol terkait dengan kandidasi dalam kontestasi pemilu legislatif, kepala daerah dan presiden/wakil presiden serta pemilihan kader-kader partai di jabatan publik lainnya.

Berjenjang. Penjenjangan kaderisasi parpol didasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat atau piramidal. Ini misalnya bisa disusun dengan melakukan penjenjangan kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut atau penyebutan lainnya. Rasionalisasi penjenjangan model hirarkhi ini bisa dilakukan karena alasan penjenjangan sebagai akibat pentahapan materi kaderisasi (materi bersifat piramidal) dan penjenjangan sebagai akibat pentahapan karir dalam organisasi (karir bersifat piramidal).

Penggunaan model penjenjangan seperti ini menciptakan beberapa implikasi dalam kaitannya dengan kehidupan internal partai. Pertama, dilakukan karena ada kebutuhan untuk menyelesaikan pada pembekalan kapasitas lainnya. Intinya, materi pengkaderan diandaikan dalam skema piramidal. Pentahapan materi dalam skema piramidal akan berguna untuk dapat memastikan bahwa setiap kader partai akan memiliki tingkat kapasitas yang sama karena melalui proses kaderisasi yang sama (standarisasi).

Kedua, penjenjangan kaderisasi sebagai akibat dari kebutuhan persyaratan meniti karir organisasi pada posisi-posisi yang ada di tingkat lokal dengan regional atau pusat. Ini misalnya tampak dari persyaratan tingkat kaderisasi tertentu yang harus diikuti oleh calon ketua partai, sekretaris jenderal dan sebagainya di setiap tingkatan.

Namun demikian penjenjangan yang didasarkan pada materi kaderisasi secara otomatis akan berpengaruh pada penjenjangan karir politik yang akan dicapai oleh politisi. Sebagai contoh, seorang yang telah mendapatkan *training* kaderisasi tingkat pertama, karier politiknya akan berhenti sebagai pengurus parpol ataupun anggota legislatif atau kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Pada akhirnya penjenjangan kaderisasi ini dibutuhkan (Syamsudin, 2016:52).

2. Model Kaderisasi

a. Kaderisasi untuk Anggota Partai Politik

Pada umumnya partai politik melakukan proses kaderisasi untuk internal kadernya. Pada partai-partai modern, anggota partai yang telah terdaftar yang membayar iuran keanggotaan secara tetap dalam jangka waktu tertentu secara otomatis akan mendapatkan *training* tertentu oleh partai politik dengan tujuan tertentu pula. Kaderisasi anggota parpol di partai yang pelembagaan politiknya bagus dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan keluaran kader sesuai dengan visi dan misi parpol yang bersangkutan. Proses kaderisasi anggota parpol dilakukan secara sistematis, berjenjang dan dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus.

Sayangnya di Indonesia, banyak partai politik yang melakukan proses kaderisasi secara insidental dan biasanya hanya diadakan pada waktu menjelang pemilu atau pilkada untuk kemenangan partai atau dalam kaitannya pembekalan calon anggota legislatif. Padahal proses kaderisasi yang bersifat terstruktur selain dapat membantu partai politik dalam meningkatkan kapasitas anggotanya juga menjadi alat untuk menilai potensi anggota-anggota partainya sekaligus parameter bagi parpol untuk melihat sejauh mana pelembagaan partai telah mengakar pada anggota-anggotanya.

b. Kaderisasi untuk non anggota partai politik

Organisasi sayap partai menjadi sumber penting lainnya dalam kaderisasi partai politik. Melalui sayap partai internasionalisasi ideologi partai politik dan pembangunan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat lainnya. Sebab, organisasi sayap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap partai memberikan andil besar bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai. Organisasi sayap partai dapat berbentuk organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi profesi, serta organisasi keagamaan (Syamsudin, 2016:52).

Kaderisasi pada organisasi sayap partai biasa sekaligus menjadi perluasan basis dari parpol yang bersangkutan. Sebuah organisasi sayap atau *underbow* partai, dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan massa baik untuk memenangkan pemilihan umum maupun untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai.

C. Sayap Partai Politik

1. Pengertian Organisasi Sayap

Organisasi sayap merupakan sebuah organisasi bagian dari partai politik yang akan membantu kinerja partai politik dalam menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 12 ayat (10) menyatakan bahwa salah satu hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Organisasi sayap sendiri menurut adalah organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing partai politik.

2. Fungsi Organisasi Sayap

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 12 Ayat (10) “Partai politik Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik”. Sebagaimana dengan maksud ayat tersebut, maka fungsi organisasi sayap partai politik yaitu mendidik masyarakat agar mampu memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang merupakan kebutuhan bagi peningkatan daya kritis dan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan demokrasi, Membimbing dan mendampingi serta memberikan avokasi terhadap masyarakat agar memiliki keberanian untuk menuntut dan menegakkan hak-hak politiknya.

Sebagai warga negara yang dimarjinalkan negara, membantu memberikan solusi alternative terhadap masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang menjadi hajat hidup masyarakat, menyampaikan data dan informasi yang benar dan aktual secara terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan kehidupan politik dan kepartaian di Tanah Air untuk mendapatkan umpan balik masyarakat, melakukan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik, terutama dalam hal paradigma dan mental attitude yang kondusif bagi upaya pembaruan partai politik dan pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan memaksimalkan peran organisasi sayap partai politik, sebagai pilar utama kaderisasi, dan penguatan kader, maka secara otomatis proses seleksi kader untuk duduk sebagai legislatif maupun eksekutif akan lebih mengedepankan kualitas intelektual, serta basis massa pendukung dan bukan basis ekonomi. Organisasi sayap partai memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi partai politik dalam upaya implementasi, sosialisasi dan diseminasi program dan kebijakan partai untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Organisasi sayap parpol dapat berupa organisasi pemuda, organisasi perempuan, organisasi buruh, organisasi tani, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok rakyat terorganisasi sesungguhnya merupakan sumber daya-sumber daya yang harus dibina dalam sebuah organisasi sayap atau

underbow partai, dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan yang sebesar-besarnya dari segenap lapisan masyarakat yang pada gilirannya mampu memenangkan partai dalam kompetisi politik secara elegan dan bermartabat.

Simpati dan dukungan masyarakat terhadap partai direspon dan dikelola dengan baik dan serius karena simpati dan dukungan masyarakat adalah faktor yang menentukan bagi keberhasilan partai dalam meraih kemenangan, disamping faktor penentu lainnya, seperti kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kejelasan visi, misi dan platform, serta profesionalitas dan integritas kader dan pimpinan partai.

Dalam kenyataannya, organisasi sayap atau *underbow* merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap memberikan andil besar bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi, serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu peran organisasi sayap juga terbilang besar dalam proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik, seperti yang terjadi saat ini, hubungan organisasi sayap dengan partai politik dapat diibaratkan seperti *simbiosis mutualisme* (satu sama lain saling menguntungkan).

Bagi partai politik dalam menjelang pemilu, organisasi sayap menjadi lahan untuk mendapatkan dukungan politik. Bahkan partai politik sering membuat organisasi sayap baru, jika segan mencari dukungan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu. Begitu juga dengan keberadaan partai politik yang tidak dapat terpisahkan dengan sistem demokrasi, bahkan menjadi syarat utama mewujudkan sistem tersebut. Melalui partai politik kebijakan dibuat dengan mekanisme proses pembuatan produk perundang-undangan.

Sehingga keberadaan organisasi sayap sangat dibutuhkan guna mengontrol dan mengevaluasi kinerja partai politik yang berada di legislatif, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal ini dilakukan dengan peran kader organisasi sayap yang menjadi politisi partai politik tertentu, sementara pengawasan eksternal dilakukan demonstrasi dan kritikan melalui media massa.

(Sony, Peran Organisasi Sayap Partai

Politik,<https://sonnyudj.wordpress.com>).

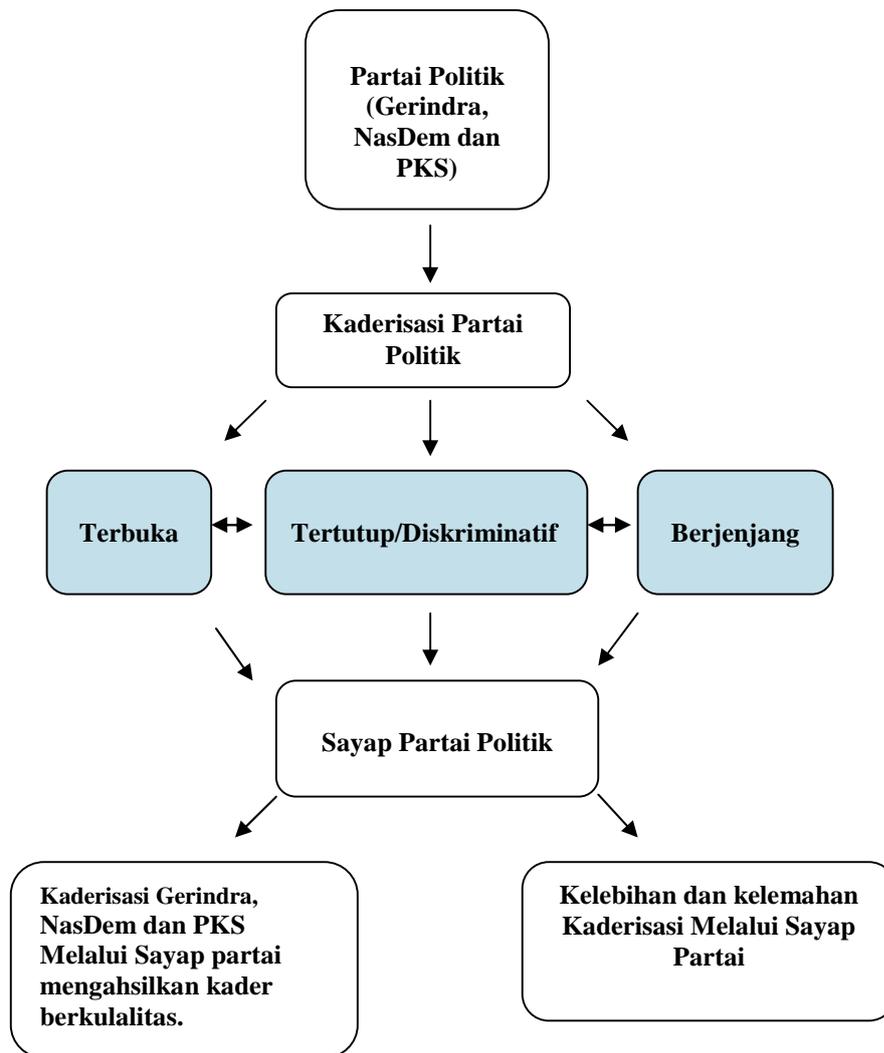
D. Kerangka Pikir

Partai politik menjalankan salah satu fungsinya, yaitu rekrutmen politik. Rekrutmen politik di sini maksudnya adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan mengadakan proses seleksi/penjaringan, rotasi dan mobilitas politik pada anggota atau kader dari partai politik untuk penempatan jabatan di dalam atau di luar partai (eksekutif dan legislatif) berupa jabatan administratif maupun politik yang berdasarkan kemampuan, kinerja, bakat serta pengalaman dari kader tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor partisipasi kaum muslimin, ulama, tokoh masyarakat dan intelektual.

Pelaksanaan rekrutmen politik dengan menjalankan tujuan dan fungsinya untuk menghasilkan kader yang berkualitas, perluasan dalam rekrutmen kader ini termasuk pada bagaimana menyusun kriteria untuk calon kader yang akan menjadi kualifikasi serta bagaimana mekanisme yang akan dilakukan dalam proses ini.

Sehingga hal ini dapat teliti, bagaimana model kaderisasi yang dilakukan partai politik antara lain Gerindra, NasDem Dan PKS Provinsi Lampung melalui sayap partai antara lain Gerindra Masa Depan (GMD) sebagai sayap dari partai Gerindra, GP NasDem sebagai sayap dari partai NasDem dan Garuda Keadilan sebagai sayap dari partai PKS sehingga menghasilkan kader yang berkualitas dan solid terhadap partainya dan apa kelebihan dan kelemahan kaderisasi partai politik melalui sayap partai.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut ini.



Bagan 1. Skema Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan hal penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, sekaligus bagian yang penting dalam perkembangan peradaban manusia. Penelitian ilmiah merupakan penelitian yang mengandung unsur-unsur ilmiah atau keilmuan di dalam aktifitasnya, penelitian ilmiah disebut juga penelitian yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena alami. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, cukup memberi kemudahan bagi studi efektivitas organisasi salah satu metode yang paling biasa digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Benny, 2012:1).

Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan postpositivisme (Sugiyono, 2011:7) dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Perspektif, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam. Kualitatif sebagai jenis penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, peranan organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik, sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif (Basrowi, 2008:21).

B. Lokasi Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong dalam menentukan lokasi penelitian terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis, seperti waktu, biaya, dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.(Ari Setiawan, 2012:28). Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan cara sengaja yaitu pada partai politik Gerindra, NaDem dan PKS serta organisasi sayap partai dibidang kepemudaan antara lain Gerindra Masa Depan (GMD) sayap partai Gerindra, GP NasDem sayap partai NasDem dan Garuda Keadilan sayap partai PKS yang berada di provinsi lampung

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah fokus penelitian atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat penelitian dan hal yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi. Ini merupakan bentuk pra analisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan memperhatikan lainnya. Dengan adanya pemfokusan akan menghindari pengumpulan data yang serampangan dan hadirnya data yang melimpah ruah. (Bungin, 2012:41)

Penelitian ini menempatkan partai politik Gerindra, NaDem dan PKS serta organisasi sayap partai dibidang kepemudaan antara lain Gerindra Masa Depan (GMD) sayap partai Gerindra, GP NasDem sayap partai NasDem dan Garuda Keadilan sayap partai PKS sebagai fokus penelitian yang pertama bagaimana model kaderisasi yang dilakukan partai politik melalui sayap partai sehingga dapat menghasilkan kader yang berkualitas menggunakan beberapa indikator model kaderisasi yaitu:

- a. Terbuka
- b. Tertutup/*Diskriminatif*
- c. Berjenjang

Fokus penelitian kedua mengetahui apa saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan kaderisasi melalui sayap partai dengan mengkaji kondisi yang terjadi didalam internal partai seperti hal nya:

- a. Sumber daya manusia (SDM)
- b. Kondisi keuangan partai
- c. kultur partai politik

D. Penentuan Informan

Pemilihan informan didasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Menurut Sanapiah Faisal teknik pengambilan sampel purposive adalah sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, dalam hubungan ini lazimnya dinyatakan atas kriteria-kriteria atau pertimbangan-pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam tehnik random. Kriteria informan adalah yang terlibat

di dalam partai politik dalam hal ini yang menjadi informan adalah ketua DPW GMD Lampung yang diketuai: Hadi Setiawan, wakil ketua DPW GP NasDem Lampung Chandra Adi Putra dan ketua DPW GK Lampung diketuai Fuad Ibrahim, akan tetapi masih dapat melibatkan informan lain seperti sekretaris partai, kader partai ataupun kader dari sayap partai serta masyarakat yang bersangkutan. (Ari Setiawan, 2012:29)

E. Jenis data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan dan menggunakan beberapa alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis dan alat dokumentasi serta alat perekam. Adapun yang akan diwawancarai adalah narasumber yang berkecimbung di organisasi sayap partai antara lain kader partai politik dan kader sayap partaian antara lain ketua, sekretaris atau anggota dari partai politik dan sayap partai politik.

2. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, dokumen, hasil penelitian yang terkait dengan studi. adapun beberapa buku yang dibaca oleh penulis adalah buku-buku ataupun hasil penelitian sebelumnya.

F. Teknik pengumpulan data

Dalam setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran tersebut umumnya eksis dalam jumlah yang besar atau banyak. Berdasarkan jenisnya penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara (Burhan, 2011:77)

1. Wawancara

Mewawancarai narasumber yang berkecimbung didalam partai politik ataupun yang berada di sayap partai politik, wawancara dalam kualitatif bersifat mendalam wawancara dan observasi bisa dilakukan secara bersamaan, wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam data yang didapat dari observasi (Rully, 2014:136).

Dalam teknik ini peneliti berusaha mengurai suatu masalah penelitian dengan menganalisis tiap jawaban dan kemudian hasil analisis tersebut menjadi pertanyaan baru sehingga peneliti mendapatkan jawaban yang diinginkan peneliti, Proses ini sering disebut probing, namun perlu diingat dalam melakukan probing diharapkan peneliti menggunakan variasi pertanyaan yang menimbulkan bias, namun variasi pertanyaan tersebut diarahkan untuk pendalaman data melalui pertanyaan yang semakin menukik/menjurus pada inti masalah (Rully, 2014:136).

2. Observasi

Observasi merupakan suatu cara sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Jenis observasi terbagi menjadi observasi partisipan (*participant observation*), partisipasi non-partisipan (*non-participant observation*) dan observasi terhadap objek (Widi, 2010:237).

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan dikarenakan peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan atau aktifitas kelompok yang diteliti. Teknik observasi digunakan untuk melihat data-data primer berupa peristiwa atau simulasi tertentu pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Selain itu dalam observasi peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam.

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data adalah menyelidiki atau mengamati hal-hal yang tidak di dapat pada saat wawancara. Melalui metode ini peneliti bisa mengamati langsung fenomena ataupun data-data lain yang bentuknya non-wawancara sebagai data tambahan yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah.

3. Dokumentasi

Selain itu juga untuk memperdalam studi peneliti akan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen kegiatan dari organisasi sayap partai politik. Serta membaca literatur-literatur yang terkait dengan studi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan nilai-nilai yang berhubungan dengan masalah penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Efendi dkk dalam Singarimbun, 1995: 240) terdiri dari:

1. *Editing*

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2014:477). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data sebagai tahap pemilihan data-data penting, *display* data sebagai tahap penyajian data, dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Milles dkk, 1992:17) yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. *Display* (Penyajian Data)

Catatan-catatan penting dilapangan disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk tabel dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu.

3. Verifikasi Data

Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah diuji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari, arti, makna dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

I. Teknik Validasi/Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dikemukakan Moleong (2014:324) yang dalam pemeriksaan data menggunakan empat kriteria:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan penelitian salah satunya melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori (Denzin dalam Patton, 2015:331).

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, hal itu dapat dicapai dengan jalan (Patton dalam Moleong, 2014:331):

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan.

Uraianya harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Temuan tersebut merupakan penafsiran yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggungjawaban.

3. Kebergantungan (*Dependality*)

Merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Semakin tinggi tingkat reliabilitas yang tercapai maka semakin baik pula penelitian tersebut.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif.

IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Partai Gerindra

1. Sejarah Partai Gerindra

Partai Gerindra merupakan salah satu partai yang berasaskan nasional religius. Partai Gerindra dibentuk pada tanggal 6 februari 2008. Kemunculan partai Gerindra di tengah-tengah masyarakat Indonesia menjadikan dunia perpolitikan tanah air menjadi penuh warna. Sebagai partai baru keikutsertaannya yang pertama pada pemilu tahun 2009, partai Gerindra mendapatkan suara yang cukup signifikan.

Partai dengan lambang kepala burung garuda ini dapat memperoleh suara nasional sebanyak 4.646.406 (4,46 %) dan mendapat perolehan suara terbanyak kedelapan dari tiga puluh delapan partai yang mengikuti pemilu 2009 atau mendapat 800.959 suara di Lampung dan meningkat pada pemilu 2014 dengan perolehan suara nasional sebanyak 14.760.371 (13,0%) atau 1.962.641.

(<http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>).

Sejarah terbentuknya Partai Gerindra, bukan merupakan sebuah kesengajaan. Bermula dari dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, terjadi obrolan antara intelektual muda Fadli Zon dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo. Ketika itu, November 2007, keduanya membahas politik terkini, yang menurut mereka sudah jauh dari nilai-nilai demokrasi sesungguhnya, demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat hanya jadi alat, bahkan, siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah jadi korban.

Kebetulan, salah satu korban itu adalah Hashim sendiri. Dia diperkarakan ke pengadilan dengan tuduhan mencuri benda-benda purbakala dari Museum Radya Pustaka, Solo, Jawa tengah. Bila keadaan seperti itu dibiarkan, negara hanya akan diperintah oleh para mafia. Fadli Zon lalu mengutip kata-kata politisi Inggris abad kedelapan belas, Edmund Burke: *“The only thing necessary for the triumph (of evil) is for good men to do nothing.”* Dalam terjemahan bebasnya, “kalau orang baik-baik tidak berbuat apaapa, maka para penjahat yang akan bertindak.” terinspirasi oleh katakata tersebut, Hashim pun setuju bila ada sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru.

Tujuannya tidak lain, agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja. Sementara kondisi yang sedang berjalan, justru memaksakan demokrasi di tengah himpitan kemiskinan, yang hanya berujung pada kekacauan. Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan di lingkaran orang-orang Hashim dan Prabowo.

Rupanya, tidak semua setuju. Ada pula yang menolak, dengan alasan bila ingin ikut terlibat dalam proses politik sebaiknya ikut saja pada partai politik yang ada. Kebetulan, Prabowo adalah anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, sehingga bisa mencalonkan diri maju menjadi ketua umum. Namun, ketika itu Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla adalah wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (<http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>).

Setelah perdebatan cukup panjang dan alot, akhirnya disepakati perlu ada partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mematangkan konsep partai, pada Desember 2007, di sebuah rumah yang menjadi markas IPS (Institute for Policy Studies) di Bendungan Hilir, berkumpul sejumlah nama. Selain Fadli Zon, hadir pula Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi dan Haris Bobihoe. Mereka membicarakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk (<http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>).

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak, sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga perbedaan di antara kita justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa indonesia.

Namun demikian mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tidak mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa indonesia dari kemelaratan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, kita terjebak dalam sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa. Hal itu berakibat menggelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan menganggur.

Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa indonesia ini kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan. Dari situlah Partai Gerindra terpanggil untuk memberikan pengabdianya bagi bangsa dan negara serta bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang (<http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>).

2. Visi Misi Partai Gerindra

a. Visi

Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi(<http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>).

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai Gerindra mengemban misi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain

(<http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>):

- 1) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
- 2) Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
- 3) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.

- 4) Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak didepan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atau latar belakang golongan.
- 5) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat disetiap tingkat pemerintahan.

3. Gerindra Masa Depan (GMD)

Organisasi sayap merupakan sebuah organisasi bagian dari partai politik yang membantu kinerja dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 12 huruf (j) menyatakan bahwa salah satu hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Organisasi sayap sendiri menurut UU No. 2 Tahun 2011 adalah organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik.

Organisasi sayap partai memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi partai politik dalam upaya implementasi, sosialisasi dan diseminasi program dan kebijakan partai untuk lebih mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Organisasi sayap parpol dapat berupa organisasi pemuda, organisasi perempuan, organisasi buruh, organisasi tani, organisasi profesi, dan kelompok-kelompok rakyat terorganisasi sesungguhnya merupakan sumber daya-sumber daya yang harus dibina dalam sebuah organisasi sayap atau *underbow* partai, dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan yang sebesar-besarnya dari segenap lapisan masyarakat.

Simpati dan dukungan masyarakat terhadap partai seyogyanya direspon dan dikelola dengan baik dan serius karena simpati dan dukungan masyarakat adalah faktor yang menentukan bagi keberhasilan partai seperti kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kejelasan visi, misi dan platform, serta profesionalitas dan integritas kader dan pimpinan partai (<http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>).

Partai gerindra memiliki beragam sayap partai untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang memiliki keanekaragaman latar belakang antara lain yaitu Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Perempuan Indonesia Raya (PIRA), Kristen Indonesia Raya (KIRA), Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA), Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma (GEMA SADHANA), Persatuan Tionghoa Indonesia Raya (PETIR), Badan Seleksi Organisasi (BSO), Badan Kesehatan Indonesia Raya (KESIRA), Gerakan Rakyat Dukung Prabowo (GARDU PRABOWO)

Gerindra Masa Depan (GMD) adalah salah satu organisasi sayap Partai Gerindra yang bergerak dibidang kepemudaan. GMD didirikan pada tanggal 7 April 2017, dengan sekretariat pusat yang berada di di JalanBrawijaya IX, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (<http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>).

Tujuan dari organisasi ini adalah untuk menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi anak-anak muda di Indonesia, agar dapat memberikan kontribusi kepada nusa dan bangsa. Dengan cara yang diinginkan sesuai dengan aspirasi pemuda, bahasa yang dimengerti di antara anak muda, dan dengan gaya dan cara yang disukai anak muda(<http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>).

GMD dibentuk atas dasar kesadaran bahwa anak-anak muda memiliki aspirasi yang amat beragam. Sebagai anak muda Indonesia, sebagai tunas muda, sudah saatnya melakukan sesuatu untuk maju bersama membangun negeri ini. GMD mewadahi dan menyalurkan beragam aspirasi tersebut dalam berbagai kegiatan dan aktivitas positif. Slogan GMD adalah membangun awal bangsa yang kokoh dan diwujudkan melalui filosofi Lima Cinta. Lima Cinta tersebut adalah Cinta Diri, Cinta Sesama, Cinta Belajar, Cinta Kesantunan, dan Cinta Indonesia.

Cinta Diri berarti Mensyukuri nikmat Tuhan pada dirinya, berbesar hati menerima kekurangan sehingga bisa melihatnya sebagai potensi diri, Cinta Sesama berarti Menghargai dan menghormati sesama seperti kita mencintai diri sendiri. Cinta Belajar berarti Bersemangat tinggi untuk

tidak pernah berhenti belajar, Cinta Kesantunan berarti Sopan, sabar, memiliki belas kasih dan suka menolong dan Cinta Indonesia berarti Kesadaran untuk memiliki dan mempertahankan identitas serta integritas bangsa secara nyata (<http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>).

4. Visi dan Misi GMD

a. Visi

Sebagai sebuah organisasi, tentunya GMD memiliki visi dan misi sebagai penunjang kinerjanya, adapun visi GMD adalah Menjadi Organisasi Kepemudaan yang mampu menyelamatkan masa depan Indonesia dengan membangkitkan semangat Nasionalisme berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

(<http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>).

b. Misi

Misi dari GMD adalah

(<http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>):

- a. Menumbuhkan kesadaran politik dan kebangsaan di kalangan pemuda untuk membangun Indonesia.
- b. Melahirkan pemimpin bangsa yang bermoral tinggi, berkarakter, bermartabat, berintegritas, terampil, peka, serta memiliki jiwa nasionalis, religius dan pluralis.

- c. Membangun kesejahteraan bangsa dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pemuda atau pemudi untuk mengelola, mengembangkan, dan melestarikan anugerah yang dimiliki Indonesia.
- d. Mengamalkan, melestarikan, dan menjaga kebudayaan Indonesia.
- e. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.

B. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

1. Sejarah Partai Nasdem

Tanggal 8 Januari 2013 merupakan tonggak penting bagi Partai Nasdem sebagai partai politik baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik terutama bagi partai politik lama karena mengubah peta politik di Indonesia dengan hadirnya kekuatan politik baru. Apabila menghitung mundur, hanya dalam rentang waktu dua tahun yakni tahun 2011 sampai 2013 Partai Nasdem mampu mentransformasikan diri sebagai partai yang berbadan hukum serta berhasil melalui tahapan-tahapan teknis seperti yang termaksud dalam UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik yakni satu tahapan oleh Kemenhukham dan dua tahapan verifikasi dari KPU.

Hal tersebut merupakan pencapaian yang luar biasa bagi partai politik baru terlebih dalam pelembagaannya Partai NasDem penuh dengan dinamika(<https://media.neliti.com/media/publications/108934-ID-pelembagaan-partai-nasdem.pdf>).

Dalam akar sejarahnya, banyak yang harus dilalui Partai NasDem mulai dari proses pra pendirian, proses pelembagaan, konflik internal hingga proses konsolidasi dalam rangka membuat strategi pemenangan partai menjelang Pemilu 2014. Berbagai peristiwa yang dilalui Partai NasDem tersebut membuat kajian historis sangat mengakar. Hal ini disebabkan karena dinamika internal partai NasDem begitu cepat berlalu dan kemudian cepat bangkit pula guna suksesi Pemilu.

Pada pra pendirian, Ormas Nasional Demokrat sebagai lembaga yang melahirkan para pendiri Partai NasDem harus mengalami masa-masa sulit yakni ditinggalkan oleh insiatornya Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta non aktifnya beberapa deklaratornya seperti Khofifah Indarparawansa, Anies Baswedan, Ahmad Syafii Maarif, Didik J. Rachbini, dan Budiman Sudjatmiko serta pengurus-pengurus daerah lainnya.

Sebabnya adalah dalam perjalanan membangun dan memperkuat Ormas Nasional Demokrat kemudian lahir partai NasDem yang mempunyai tujuan, ide dan gagasan yang sama dengan Ormas NasDem serta sekretariat di alamat yang sama pula.

(<https://media.neliti.com/media/publications/108934-ID-pelembagaan-partai-nasdem.pdf>).

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah lahirnya Partai NasDem memang diinginkan atau sebaliknya? Jawabannya sudah pasti beragam, karena tentu para aktor politik yang tergabung dalam Ormas Nasional Demokrat memiliki motif yang berbeda dalam menghadapi situasi seperti itu. Peristiwa tersebut menjadi ujian pertama dalam pra pendirian Partai NasDem, bahkan dalam dinamikanya terjadi fragmentasi di dalam tubuh Ormas Nasional Demokrat antara tiga opsi dalam menentukan sikap terhadap pembentukan Partai NasDem.

Pertama, opsi yang menginginkan Ormas NasDem untuk tetap pada bentuknya dan tidak dalam posisi berpolitik praktis. Hal ini menyangkut dengan peran dan tujuan dari sebuah gagasan besar restorasi tidak diukur dalam keterlibatannya di dalam hiruk pikuk politik praktis namun akan lebih baik dalam Ormas. Sedangkan yang kedua adalah opsi supaya Ormas seutuhnya terlibat dalam politik dengan mentransformasikan lembaganya sebagai partai politik secara utuh.

Alasan yang mendukung opsi kedua ini berdasarkan sebuah keyakinan bahwa restorasi akan terwujud melalui kekuasaan. Ketiga adalah opsi yang dianggap sebagai akomodatif. Opsi ini menekankan penyatuan kubu yang setuju membentuk partai dan yang tidak untuk kemudian melebur menjadi kesatuan Ormas Nasional Demokrat dan mengamini pula adanya gagasan untuk mengeksekusi nilai-nilai ideologi restorasi dalam bentuk Partai Politik. dengan kata lain, opsi ketiga ini menyebutkan bahwa

Ormas tetaplah Ormas dan Partai NasDem sebagai entitas yang berbeda dari ormas.

(<https://media.neliti.com/media/publications/108934-ID-pelebagaan-partai-nasdem.pdf>).

Pilihan sulit waktu itu harus diputuskan oleh Surya Paloh sebagai Ketua Umum untuk menentukan arah dan langkah kedepannya Nasional Demokrat. Pilihannya tentu antara menjadi Ormas seutuhnya, menjadi partai politik, atau menapaki keduanya yakni sebagai Ormas dan Partai politik yang berjalan beriringan. Atas berbagai pertimbangan akhirnya Surya Paloh memutuskan untuk memilih opsi ketiga dimana keduanya adalah jalan perjuangan dalam memasifikasi gerakan perubahan restorasi. Konsekuensi logis dari kebijakannya tersebut kemudian berdampak pada mundurnya sebagian basis-basis massa Ormas Nasional Demokrat yang merasa kecewa apalagi keanggotaannya ada yang berasal dari PNS.

Walaupun demikian, Partai NasDem masih tetap mendapatkan simpati dari masyarakat lewat perkenalannya sebagai partai politik baru di stasiun-stasiun Gelombang massa yang menjadi anggota baru baik di tingkat pusat sampai daerah tidak terbendung lagi karena antusiasme masyarakat semakin tinggi. Pada tataran pusat, Hary Tanoesoedibyo hadir menjadi orang baru dan langsung mengisi posisi Ketua Dewan Pakar Partai NasDem. Partai NasDem terus bergerak dengan terus mengupayakan kuantitas anggota bisa menunjukkan tren yang positif.

Tetapi sebenarnya kematangan institusi belum teruji seperti suprastruktur dan infrastruktur untuk bisa mengakomodasi berbagai kekuatan dengan berbagai kepentingan politik. hal ini bisa dilihat dari fenomena friksi antar kelompok di internal Partai NasDem. Keadaan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik antara loyalis Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibyo beberapa hari sebelum Kongres I Partai NasDem 23-26 Januari 2013.

Konflik besar di internal partai tidak bisa dipecahkan melalui instrumen organisasi hingga fragmentasi untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing pun tidak terelakan. Bahkan dalam jumpa pers yang diadakan di Aula Museum Adam Malik, Hary Tanoesoedibyo mengungkapkan konflik tersebut seperti perang di dalam organisasi dan tidak bisa dibendung lagi.¹² Klimaksnya Hary Tanoesoedibyo selaku Ketua Dewan Pakar Partai NasDem menyatakan mundur pada tanggal 17 Januari 2013.

Menyusul dibelakangnya 3 pejabat teras Partai NasDem menyatakan mundur melalu surat pengunduran diri seperti Sekretaris Jendral Ahmad Rofik, Wakil Sekretaris Jendral Saiful Haq, dan Ketua Internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Endang Tirtana. Faktanya, konflik tersebut sebenarnya terbangun dari berbagai motif politik antara yang mendukung pengusungan Surya Paloh sebagai Ketua Umum dengan yang menolak (<https://media.neliti.com/media/publications/108934-ID-pelembagaan-partai-nasdem.pdf>).

Gesekan demi gesekan terjadi ditataran pejabat teras dimana friksi terus melebar hingga “perang terbuka” pun terjadi. Upaya untuk meredakan konflik dilakukan dengan proses mediasi yang diadakan di Hotel Grand Hyatt tanggal 16 Januari 2013 dengan mediatornya adalah Rosano Barack. Pada proses ini, Hary Tanoesoedibyo bersedia untuk tidak menjadi ketua Majelis Partai bahkan Capres dari Partai NasDem dan beberapa persyaratan lain dalam materi kompromi.

Proposal berisi sebuah syarat untuk posisi Ketua Majelis Nasional Partai (MNP) harus diisi oleh orang lain bukan Jan Darmadi dan Sekretaris Jendral tetap Ahmad Rofik serta menganulir pemecatan Syaiful Haq. Namun proposal tersebut tidak ditanggapi oleh Surya Paloh padahal upaya tersebut merupakan titik kompromi diantara keduanya. Surya Paloh memiliki alasan kuat untuk tidak menanggapi proposal tersebut karena kelompok dari Hary Tanoesoedibyo telah melakukan kegiatan yang inkonsensus.

Setidaknya ada 3 kegiatan yang tersembunyi tanpa kesepakatan dilakukan oleh Hary Tanoesoedibyo. Pertama, bulan Juni 2012 Hary Tanoesoedibyo melakukan janji politik dengan memodali para caleg NasDem 5 milyar sampai 10 milyar rupiah. Kedua, menonjolkan sosok Hary Tanoesoedibyo dalam media iklan yang sering dilakukan oleh partai NasDem untuk memperkenalkannya ke publik di stasiun televisi MNC Grup. Padahal, dalam konsensus, sosok partai yang harus ditonjolkan bukan sosok-sosok perorangan. Ketiga, Hary Tanoesoedibyo melakukan beberapa kali

pertemuan dengan DPW-DPW tanpa sepengetahuan para deklaratour partai, sehingga memunculkan sebuah fragmentasi yang jelas antara beberapa DPW. Pertemuan pertama diadakan di Restoran Bunga Rampai, Menteng, Jakarta Pusat, 16 Desember 2012.

Pertemuan tersebut digagas oleh Hary Tanoe dan diikuti oleh Ketua Umum Caprice Rio Capella, Sekjen Ahmad Rofik, dan 11 DPW, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

Tiga hari berikutnya, rapat tersebut ditindaklanjuti lagi dengan pertemuan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan. Rapat lanjutannya digelar lagi di Menara MNC, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Agenda Rapat tersebut membahas setidaknya satu hal yang sensitif, yaitu amanat sebagian DPW kepada Hary Tanoesoedibyo untuk menyelamatkan Partai Nasdem dan menjalankan roda partai sebagaimana sistem yang ada, dan wacana menghentikan biaya operasional partai bagi para penentang ide ini yaitu bagi para pendukung Surya Paloh.

Tentunya, mundurnya pejabat teras partai NasDem menimbulkan dampak yang sistemik bagi kader-kader di daerah. Hal ini disebabkan konstituensi Hary Tanoesoedibyo yang dilakukannya selama menjadi Dewan Pakar Partai NasDem dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pengurus daerah berhasil menghasilkan pendukung yang kuat.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat Rustam Effendi menjadi pejabat teras daerah pertama yang menyatakan mundur beberapa jam setelah pernyataan mundur Hary Tanoesoedibyo. Kemudian disusul Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Armyun Gultom serta dari beberapa pengurus dan anggota daerah lainnya seperti Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bone, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung barat serta daerah lain dengan jumlah yang tak kalah banyaknya.

Tidak hanya dalam struktural partai, konflik terus mengamuka hingga terjadi pada sayap sayap partai diantaranya terjadi pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) NasDem dan Garda Pemuda (GP) NasDem (<https://media.neliti.com/media/publications/108934-ID-pelebagaan-partai-nasdem.pdf>).

2. Visi dan Misi Partai Nasdem

a. Visi

Indonesia yang merdeka sebagai negara bangsa, berdaulat secara ekonomi, dan bermartabat dalam budaya

(<https://www.partainasdem.id/pages/visi-misi>).

b. Misi

Misi dari partai Nasdem, yaitu

(<https://www.partainasdem.id/pages/visi-misi>):

- 1) Membangun Politik Demokratis Berkeadilan berarti menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat dengan cara membuka akses masyarakat secara keseluruhan.

Mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat karakter bangsa, serta melakukan perubahan menuju efisiensi sistem pemilihan umum.

- 2) Memantapkan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem pelayanan masyarakat. Melakukan reformasi hukum dengan menjadikan konstitusi UUD 1945 (Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai kontrak politik kebangsaan.
- 3) Menciptakan Demokrasi Ekonomi melalui tatanan demokrasi ekonomi maka tercipta partisipasi dan akses masyarakat dalam kehidupan ekonomi negara, termasuk di dalamnya distribusi ekonomi yang adil dan merata yang akan berujung pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan cita-cita ini maka perlu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, sistem jaminan sosial nasional, penguatan industri nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal.
- 4) Menjadikan Budaya Gotong Royong sebagai karakter bangsa. Dalam mewujudkan ini maka sistem yang menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional yang terstruktur dan menjamin hak memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan yang menciptakan solidaritas dan soliditas nasional, sehingga seluruh rakyat Indonesia merasakan cita rasa sebagai sebuah bangsa dan menjadikan gotong royong sebagai amalan hidup keseharian.

Kebudayaan ini akan menciptakan karakter bangsa yang bermartabat dan menopang kesiapan Negara dalam kehidupan global.

3. Garda Pemuda (GP) Nasdem

Gerakan perubahan restorasi Indonesia disambut oleh antusiasme yang tinggi dari kalangan muda. Karena itu, sesuai amanat Rapimnas Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat 2011 tentang pendirian sayap-sayap organisasi masyarakat NasDem memiliki beberapa sayap partai tidak hanya dalam bidang kepemudaan tetapi setiap masyarakat dapat terwakili dengan adanya sayap partai NasDem antara lain Badan Advokasi Hukum (BAHU), Gerakan Massa Buruh (Gemuruh), Liga Mahasiswa Nadem, Persatuan Petani Nasional Demokrat (Petani NasDem), Garda Pemuda NasDem (GP NasDem).

Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh menugaskan Wakil Sekretaris Jenderal Nasional Demokrat Martin Manurung untuk merintis pembentukan Garda Pemuda NasDem. Menyambut geliat arus bawah Nasional Demokrat yang terus menggelora, termasuk menghimpun diri dalam gerakan perubahan di bidang politik melalui Partai NasDem, maka Martin Manurung menggandeng Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Saiful Haq untuk bersama-sama menjalankan tugas pembentukan Garda Pemuda NasDem.

(<https://www.partainasdem.id/pages/visi-misi>).

Sambutan yang luas dari kalangan muda membuat pembentukan Garda Pemuda NasDem berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, sehingga resmi dideklarasikan di Balai Kartini Jakarta pada 14 Juli 2011. Dalam deklarasi itu, Dewan Pimpinan Pusat beserta 560 anggota Barisan Reaksi Cepat (BARET) dilantik oleh Surya Paloh sebagai Ketua Dewan Pembina Garda Pemuda NasDem (<https://www.partainasdem.id/pages/visi-misi>).

4. Visi dan Misi GP Nasdem

a. Visi

Garda Pemuda Nasdem (GP Nasdem) adalah organisasi kepemudaan resmi Nasional Demokrat yang mengusung visi sebagaimana tertuang dalam Manifesto Nasional Demokrat yang mengemban misi Restorasi Indonesia. Terbuka untuk pemuda-pemudi dari semua kalangan dan beragam latar belakang untuk berhimpun dan bergerak dalam merestorasi Indonesia.

b. Misi

Menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda secara Nasional demi terwujudnya kader muda yang sejalan dengan cita-cita Restorasi Indonesia dengan menempatkan pemuda sebagai roda penggerak kehidupan bangsa dan negara.

C. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1. Sejarah PKS

Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera tidak lepas dari peranan penting Partai Keadilan. Pernyataan ini bukan tanpa bukti, dapat kita amati di mana pada pemilu 1999, Partai Keadilan menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 partai politik peserta pemilu. Hasil ini tidak mencukupi untuk mencapai ketentuan *electoral threshold*, sehingga tidak bisa mengikut pemilu 2004 kecuali berganti nama dan lambang. Karena kegagalan tersebut Partai Keadilan bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam waktu relatif singkat partai ini berkembang pesat, terutama pertumbuhan kader-kadernya yang selalu dibimbing dengan cara tarbiyah. Keputusan pimpinan tarbiyah menuju partai politik merupakan sikap keberanian dan komitmen yang tinggi, karena dari keputusan tersebut penuh resiko.

Dalam hal ini jika dilihat dari ormas yang lain yang tidak berani untuk aktivis dalam partai politik, seperti HTI, MMI dan FPI yang cenderung tidak ikut serta dalam sistem partai politik, mereka tidak mau ikut serta dengan alasan demokrasi merupakan produk barat.

Karena keberaniannya ini sekarang menjadi salah satu partai besar di Indonesia dan mendapatkan suara yang cukup banyak di pileg diberbagai Kota atau Kabupaten. Perkembangannya diberbagai wilayah semakin tersebar, apalagi di Kota Surabaya yang kadernya semakin banyak terdiri dari anak muda (<http://pksmalang.atSPACE.com/visi-misi.htm>).

2. Visi dan Misi PKS

a. Visi

Sebagai Partai Dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa

(<http://pksmalang.atspace.com/visi-misi.htm>).

b. Misi

Adapun misi dari PKS adalah

(<http://pksmalang.atspace.com/visi-misi.htm>):

1. Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai *anashir taghyir*.
2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai *markaz taghyir* dan pusat solusi.
3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
5. Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk

terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan *wihdatul-ummah*, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.

7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak *kedhaliman* khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

3. Garuda Keadilan (GK)

Garuda Keadilan (GK) adalah salah satu sayap muda PKS yang sebagian besarnya merupakan putra-putri Kader PKS. GK mempunyai inisiatif untuk merangkul semua pemuda Islam Indonesia yang ingin memberikan kontribusinya bagi perbaikan negeri ini. Adapun keanggotaan GK dirintis oleh anak kader PKS dari usia SMA hingga mahasiswa. Sampai saat ini keanggotaannya sudah menyebar di beberapa daerah di Nusantara, meliputi: Jakarta, Bogor, Jawa Barat, Bekasi, Jogjakarta, Jawa Tengah, Lampung, Palembang, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Tidak hanya sayap-sayap bagi pemuda akan tetapi partai PKS Memiliki beberapa sayap partai politik antara lain Gema Keadilan, PKS muda, Gerakan Muslimah, Relawan Kemanusiaan (RK PKS). GK diharapkan bisa menghimpun para pemuda menjadi tempat alternatif untuk melakukan hal-hal positif. Visinya membangun komunikasi yang efektif, melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas akhlak,

mengembangkan potensi serta mewadahi dan menyalurkan bakat anggotanya. GK menganggap ini tantangan yang harus dilalui dengan senang hati dan penuh keikhlasan.

(<http://pksmalang.atspace.com/visi-misi.htm>).

4. Visi dan Misi GK

a. Visi

Menjadikan Gerakan Muda (Garuda) Keadilan sebagai Wadah Positif bagi Pengembangan Kreatifitas dan Potensi Pemuda Islam Indonesia

(<http://pksmalang.atspace.com/visi-misi.htm>).

b. Misi

Misi dari GK adalah :

- 1) Menjalin dan Membangun Komunikasi yang Efektif.
- 2) Melaksanakan Kegiatan-kegiatan untuk Meningkatkan Kualitas Akhlak.
- 3) Membuat Program-program yang Menunjang Pengembangan Potensi Pemuda Islam.
- 4) Menyalurkan dan Mewadahi Minat dan Bakat Anggota.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang peneliti peroleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Model kaderisasi pada Partai Gerindra menggunakan prinsip kaderisasi terbuka, tidak tertutup/*diskriminatif*, dan berjenjang.
 - a. Berdasarkan model kaderisasi terbuka, setiap anggota partai memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan kader agar bisa menjadi kader yang dapat membangun partai dan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam visi dan misi Partai Gerindra itu sendiri.
 - b. Berdasarkan prinsip kaderisasi tertutup/*diskriminatif*, dalam perekrutan kader maupun anggota sayap partai, Partai Gerindra telah berupaya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk ikut dalam dunia politik, tanpa membedakan kondisi sosial, ekonomi, maupun etnis selama kader atau anggota sayap partai tersebut memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia serta tidak bertentangan dengan ideologi negara.

- c. Berdasarkan model kaderisasi berjenjang, dalam perekrutan kader maupun anggota partai di Partai Gerindra, dimulai dari tingkat dasar, di mana pada tingkat tersebut, para kader pemula diberikan pelatihan dan pendidikan politik. Partai politik di negara-negara demokrasi yang telah mapan, mempunyai sistem pendidikan kader dan melakukan pendidikan bagi kader baru.
2. Model kaderisasi partai NasDem menggunakan prinsip kaderisasi terbuka, tidak tertutup/diskriminatif, dan berjenjang.
 - a. Berdasarkan model kaderisasi terbuka, partai NasDem melakukan model kaderisasi terbuka, dalam perekrutan kader maupun anggota sayap partai. Partai NasDem berupaya menciptakan calon pemimpin dengan mempersiapkan kader-kader muda.
 - b. Berdasarkan model kaderisasi tertutup/diskriminatif, Partai NasDem berpegang teguh pada norma non-diskriminasi dalam perekrutan kader maupun anggota sayap partai, karena setiap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas, memiliki hak untuk berpolitik.
 - c. Berdasarkan model kaderisasi berjenjang, Partai NasDem telah mengembangkan model kaderisasi berjenjang berupa pemberian materi kepada para anggota kaderisasi dalam lingkup kabupaten atau kota yang dilakukan DPC yaitu kaderisasi tingkat pertama, di tingkat provinsi yaitu DPW dilakukan kaderisasi tingkat madya, dan pada tingkat paling atas dilakukan kaderisasi tingkat utama yang dilakukan oleh DPP pada tingkat nasional.

3. Model kaderisasi partai PKS berdasarkan prinsip terbuka, tertutup/diskriminatif dan berjenjang.

Sedikit berbeda dengan kaderisasi yang dilakukan partai Gerindra dan NasDem. PKS merupakan partai yang mengusung nilai-nilai Islami yang dikembangkan melalui dakwah. PKS tidak menganut sistem terbuka tetapi mengunakan prinsip tertutup/diskriminatif, untuk bergabung kedalam partai siapa saja memiliki kesempatan menjadi anggota partai akan tetapi menjadi kader PKS, partai ini merekrut calon-calon kader yang memiliki nilai religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai islami. PKS tetap melakukan model kaderisasi berjenjang. Pada PKS jenjang keanggotaan PKS terdiri dari anggota pendukung dan anggota inti. Setiap anggota sebagaimana kebijakan partai mewajibkan kadernya terlibat aktif dalam *training* (pelatihan).

4. Kelebihan dan Kelemahan pada model kaderisasi sayap partai dari segi sumber daya manusia, pemberdayaan organisasi sayap partai politik, menjadi keharusan karena dari situlah seorang kader dilatih bagaimana membangun sistem politik yang baik. Dari segi keuangan partai, partai hanya bergantung pada dana kas anggota dan partai politik, sehingga terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Sedangkan dari segi kultur partai politik, ketiga partai yang menjadi fokus dalam penelitian memiliki kultur yang dinamis dan memiliki citra yang baik di mata masyarakat, sehingga proses rekrutmen kader dan anggota sayap partai akan mempengaruhi elektabilitas partai politik menjadi semakin baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Gerindra dan NasDem menggunakan model kaderisasi terbuka akan tetapi sebaiknya harus memiliki kualifikasi yang lebih ketat sehingga proses rekrutmen kader dan anggota sayap partai akan menghasilkan kader yang berkualitas dan menjadikan elektabilitas partai semakin baik.
2. Partai Politik seharusnya memberikan dukungan penuh kepada sayap partai khususnya dalam hal operasional, agar dapat mendukung proses terbentuknya kader unggul.
3. partai politik seharusnya lebih memaksimalkan sayap partai dalam hal pengkaderan karena dari sayap partailah kader akan terbentuk sejak dini yang nantinya akan melahirkan kader kader yang solid terhadap partai politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Alwi, Hasan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. BalaiPustaka: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Bandung : Gramedia Pustaka
- Basrowi, 2002. *Memahami penelitian kualitatif*. Rineka cipta: Jakarta.
- Burhan, 2011. *Metode penelitian kualitatif*. Raja Grafindo Perdana: Jakarta.
- Bungin, 2015. *Metodelogi penelitian kualitatif*. Rajagrafindo: Depok
- Firmansyah. 2008. *Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Politik Di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Indriawan, Rully. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Surabaya : Refika Aditama
- Kantaprawira, Rusadi. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar BaruAlgensindo.
- Kurniawan, Benny, 2012, *Metodelogi Penelitian*, Tangerang: Jelajah Nusa, Cet.I
- Miles, Matthew B dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Library of Congress Catalogue-in Publication Data: United Stated of America.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W Laurence. 2014. *Social Reseach Methods: Qualitative and Quantitative Approach 7th Edition*. British Library Cataloguing-inPublication Data: United State of America.

Patton, Michael Quinn. 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods 4th Edition*. Library of Congress Catalogue-in Publication Data: United States of America.

Setiawan, Ari. 2011. *Metodelogi penelitian kualitatif*. Nuha Medika: Yogyakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES: Jakarta.

Subiyanto, Ibnu. 2014. *Pemimpin Berkaki Rakyat Membangun Parpol Berbasis Kader*. Galang Pustaka: Yogyakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Syamsudin. 2016. *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. LIPI, Jakarta.

Jurnal :

Amaliya Hidayatul Fajrina. 2017. *partai politik yang berjudul Strategi Rekrutmen Partai Gerindra Dalam Kaderisasi Pemuda di Kota Surabaya*. Vol 6 No 1. Jurnal Politik Muda, hal. 1-6

Deby Triasa (2012). *Sistem Kaderisasi Partai Golkar Era Reformasi (Studi Kasus DPD Golkar Jawa Tengah)*. Vol 1 No 1. Journal of Politic and Government Studies, hal. 1-14

M. Djadjiono (2008). *Formulasi Hubungan Parpol dengan Organisasi Sayap Partai*. Vol 17 No 2. Analisis CISS, hal. 206-203

Bayu Mitra Adhytama Kusuma dan Theresia Octastefani (2017). *Negoisasi Dakwah Dan Politik Praktis Membaca Orientasi Organisasi Sayap Keagamaan Islam Pada Partai Nasionalis*. Vol 2 No 1. Jurnal Dakwah dan Komunikasi, hal. 1-24

Aditya Surya dan Agus Satmoko (2015). *Pola Kaderisasi Kepemimpinan Partai Politik (Studi Pada DPC PDI-P Kabupaten Nganjuk)*. Vol 2 No 3. Kajian moral dan Kewarganegaraan. hal. 754-769